

RESOLUSI KONFLIK MASYARAKAT KELURAHAN BAIYA DAN KELURAHAN LAMBARA

Muhammad Isa Yusaputra

Dosen Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

ABSTRAK

Konflik yang terjadi di Sulawesi Tengah dalam kurun 15 tahun ini sangat beragam. Konflik yang terjadi Poso sejak tahun 1998 – 2002 serta konflik-konflik komunal yang terjadi di lembah kota Palu seperti konflik antara Nunu Tavanjuka serta konflik Lambara dan Baiya. Walaupun skala konflik di kota palu tidak sebesar konflik Poso namun karena bersifat sporadis dan seakan tiada akhir, maka seharusnya menjadi PR penting bagi seluruh masyarakat untuk bisa mencari jalan damai bagi semuanya. Resolusi konflik yang telah dilakukan untuk meredam konflik yang terjadi di kedua kelurahan telah ditempuh, bila dipetakan sesuai dengan teori Boundling; 1. “Menghindari konflik” adalah menawarkan sebuah kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Dalam upaya penyelesaian konflik masyarakat Lambara dengan Baiya, pemerintah Kota Palu menawarkan pilihan damai kepada para tokoh masyarakat dan aparat desa. Tokoh masyarakat ini berperan sebagai koordinator lapangan dalam mewujudkan perdamaian di kedua kelurahan. Selain itu, ada penandatanganan kesepakatan (berita acara) perdamaian yang jika dilanggar akan menghasilkan konsekuensi tertentu. 2. “Menaklukkan” atau mengeliminasi konflik dengan penegakkan hukum. Sesuai dengan perjanjian pemerintah dengan pihak dari Kelurahan Lambara dan Kelurahan Baiya, jika konflik kembali terjadi, maka penegakkan hukum akan digunakan sebagai pendekatan penyelesaian. 3. “Mengakhiri konflik” melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi dalam kesepakatan jika terjadi konflik, Penyelesaian konflik antara kelurahan Lambara dan Baiya memerlukan solusi yang bersifat permanen yang hingga kini belum terealisasi sepenuhnya.

Key words: Konflik, resolusi, Baiya dan Lambara

PENDAHULUAN

Konflik saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang masyarakatnya jauh bersifat lebih heterogen, baik dari segi etnis, agama, golongan maupun latar belakang yang bersifat politik. Konflik justru berada di daerah pedesaan yang diketahui memiliki ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang lebih erat, sebagai tradisi nenek moyang.

Konflik pada hakekatnya merupakan suatu gejala sosial yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, dan oleh karenanya melekat pula di dalam kehidupan setiap bangsa. Walaupun derajat dan pola konflik ini berbeda dalam berbagai masyarakat. Oleh karenanya, sumber yang menyebabkannya pun mempunyai ragam dan pola yang tidak sama pula. Karena pada dasarnya sifat dan karakter dari konflik yang terjadi di Indonesia tersebut sangat bersifat lokal dan unik.

Konflik yang terjadi di Sulawesi Tengah dalam kurun 15 tahun ini pun juga sangat beragam. Konflik yang terjadi Poso sejak tahun 1998 – 2002 serta konflik-konflik komunal yang terjadi di lembah kota Palu seperti konflik antara Nunu Tavanjuka serta konflik Lambara dan Baiya. Walaupun skala konflik di kota palu tidak sebesar konflik Poso namun karena bersifat sporadis dan seakan tiada akhir, maka seharusnya menjadi PR penting bagi seluruh masyarakat untuk bisa mencari jalan damai bagi semuanya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk konflik yang terjadi antara masyarakat Kelurahan Baiya dengan Masyarakat Kelurahan Lambara?
2. Bagaimana bentuk resolusi konflik untuk menyelesaikan permasalahan kedua kelurahan tersebut?

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan sesuai fokus masalah penelitian yaitu menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat serta mendalam mengenai resolusi konflik masyarakat antara kelurahan Baiya dan kelurahan Lambara.

Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di kelurahan Baiya dan Kelurahan Lambara.

Teknik Penarikan Sampel

Informan dipilih berdasarkan penunjukan langsung dari peneliti (*purposive sampling*) dengan pertimbangan yang dipilih adalah orang-orang terlibat langsung, sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih banyak mengenai objek yang diteliti. Informan dipilih sebanyak 5 orang yaitu :1). Lurah Lambara; (2). Ketua Bankamdes Baiya; (3). Tokoh masyarakat Lambara; (4). Tokoh masyarakat Baiya, dan (5). Pihak Kepolisian.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan atas dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui observasi di lokasi penelitian. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan kepentingan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari olah bacaan beberapa referensi seperti buku, majalah, makalah, koran, jurnal dan dokumen berupa data korban konflik, program pemberdayaan masyarakat korban konflik dari pemerintah daerah serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat menjadi referensi dalam penelitian

Bahan dan Alat Penelitian

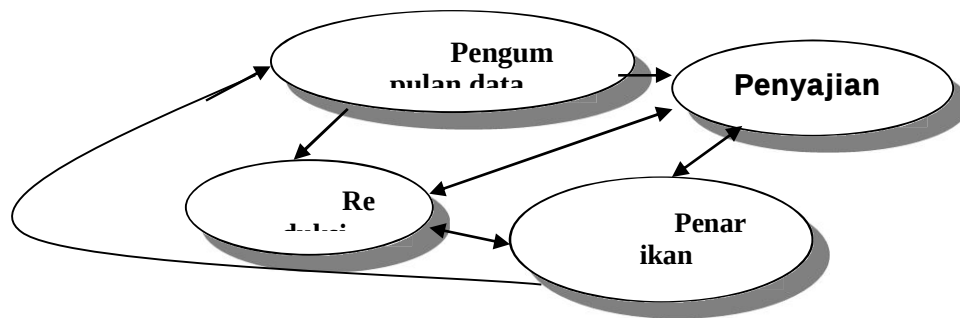
Secara garis besar prosedur pelaksanaan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data mengenai hasil-hasil penelitian serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan tanya jawab melalui proses wawancara secara mendalam dengan para informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi teknik wawancara serta teknik dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini, berupa serangkaian pernyataan tertulis dalam bentuk naskah tertulis yang terdokumentasikan, daftar isian kuesioner serta dalam bentuk catatan lapangan wawancara yang bersifat

deskriptif. Data penelitian yang telah terkumpul tersebut, selanjutnya ditata, diketik, disusun, dikategorisasikan, disunting untuk dianalisis lebih lanjut. Bogdan dan Biklen (1992:153) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui langkah kerja dengan data yang diperoleh kemudian diorganisasikan, dipilah-pilah dalam unit-unit, dilakukan sintesis, menyusun pola-pola, mengungkapkan dimensi esensial dari temuan penelitian dan membuat deskripsi hasil penelitian.

Langkah analisis data penelitian ini mendasarkan pada model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1992: 16) yang mengemukakan langkah analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara simultan, yakni; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.



Gambar 4 : Langkah Analisis Data Kualitatif : Model Interaktif (diadaptasi dari Miles dan Huberman, 1992 : 20).

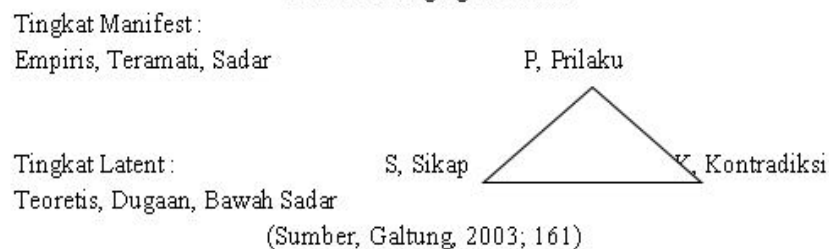
TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konflik

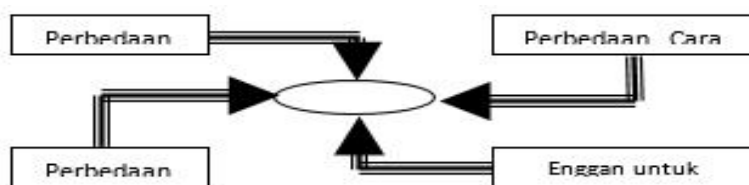
Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Konflik adalah proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak melebur ke dalam dunia sosial di sekelilingnya. (Coser dalam Poloma, 1994:108).

Galtung (2003,161) mengajukan sebuah model konflik yaitu konflik yang meliputi konflik simetris yaitu konflik kepentingan antara orang-orang yang relatif sama dan konflik yang tidak simetris yaitu konflik yang muncul dari orang yang berbeda. Galtung menyatakan bahwa konflik sebagai bentuk segitiga dimana terdiri dari: Kontradiksi (dasar dari suatu konflik yang merujuk kepada “ketidakcocokan tujuan” yang ada atau dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai yang disebabkan oleh apa yang disebut “ketidakcocokan antara nilai sosial dan struktur sosial”; Sikap (persepsi pihak-pihak yang bertikai, hubungan mereka dan kesalahan persepsi di antara mereka dan diri mereka sendiri); prilaku (Komponen yang termasuk di dalamnya kerjasama atau pemaksaan, gerak tangan atau gerakan tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan). Ketiga komponen ini muncul secara bersama-sama dalam sebuah konflik total.

Gambar 1. Segitiga Konflik



Selain apa yang telah dikemukakan oleh Galtung di atas, Pranoto dan Suprati (2003;39) mengemukakan bahwa sesungguhnya konflik dalam kehidupan setiap orang dan komunitas masyarakat tidak dapat dihindari karena berbagai hal yang dapat digambarkan sebagai berikut :



(Gambar 2. Penyebab konflik)

Susan (2009; 99) mengemukakan dua jenis atau bentuk konflik yaitu pertama, konflik vertikal adalah konflik antar elite dan massa (rakyat). Hal menonjol dalam konflik ini ialah digunakannya instrument kekerasan negara, sehingga timbul korban di kalangan massa; kedua, konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) sendiri.

Konflik dan Sumber Konflik dari Sisi Perspektif Komunikasi.

Komunikasi adalah medium dimana konflik dapat diciptakan dan diatur. Cara berkomunikasi dengan orang lain seringkali menciptakan konflik. Dari sudut pandang komunikasi, konflik pada dasarnya terjadi karena adanya kesenjangan (gap) komunikasi antar berbagai kelompok dalam suatu bangsa. Konflik tidak dapat diacuhkan karena akan memiliki hubungan yang berkelanjutan.

Rollof (1978 dalam Gudykunts, 1997;278) mengklasifikasikan beberapa sumber konflik. Pertama, konflik terjadi ketika orang-orang salah dalam menafsirkan perilaku antara yang satu dengan yang lain; kedua, konflik dapat muncul dari persepsi ketidakcocokan, seperti merasa kepribadian atau karakteristik yang berbeda; Ketiga, konflik muncul ketika orang-orang tidak sependapat dengan perilaku orang lain.

Terhambatnya komunikasi menurut Samovar, Porter dan Jain (1985) dapat pula menimbulkan konflik atau kesalahpahaman yang terjadi karena, (1). Adanya perbedaan dalam tujuan berkomunikasi; (2). Etnosentrisme; (3). Kurangnya kepercayaan pada pihak lain; (4). Penarikan diri secara psikologis dari upaya untuk berkomunikasi; (5). Kurangnya empati atau kemampuan untuk menempatkan diri pada diri orang lain; (6). Kecenderungan untuk membuat stereotype; dan (7). Pengalaman kekuasaan suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain.

Konflik dapat terjadi karena masalah bahasa, pola Selaras dengan hal tersebut Ruben (1992; 337) juga melihat bahwa non verbal, sikap, persepsi, orientasi nilai dan komponen pola pemikiran budaya. Sedangkan menurut Mulyana dan Rahmat (1996;204) konflik dapat disebabkan oleh perbedaan paham, ideologi, sangat etnosentris, tidak memahami dan menghargai budaya bangsa lain, serta memiliki stereotype terhadap suku bangsa lain.

Kekerasan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari konflik. Galtung (Miall, 2002;22) mengembangkan segitiga kekerasan dalam konflik yaitu kekerasan langsung (anak-anak dibunuh), kekerasan struktural (anak-anak mati dalam kemiskinan) dan kekerasan budaya (apapun yang

membuatkan kita atau membenarkan setiap bentuk kekerasan). Perubahan kekerasan langsung dengan cara perubahan perilaku konflik, kekerasan struktural dengan memindahkan kontradiksi struktural dan ketidakadilan serta kekerasan budaya dengan mengubah sikap.

Teori Resolusi atau Penyelesaian Konflik

Cara kita mengatasi konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Sangat mungkin melakukan perubahan pada respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat. Resolusi konflik adalah istilah konfrehensif yang mengimplikasikan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memperhatikan akar dari suatu konflik dan usaha penyelesaiannya. Usaha ini bermakna tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan memungkinkan mereka untuk mengakhiri konflik. Tujuan penyelesaian konflik adalah mentransformasi konflik dengan kekerasan yang ada atau berpotensi untuk ada, menjadi proses perubahan sosial dan politik yang penuh damai (tanpa kekerasan).

Wiliam Chang (Riadi, dkk;24) mengatakan bahwa dalam kondisi dan situasi konflik yang menyebar di Indonesia, tiga langkah untuk mengatasi konflik tersebut, yaitu (1). Menggunakan kekuasaan secara bijaksana untuk mencegah menyebarnya konflik ke wilayah lainnya; (2). Memperlancar usaha-usaha sosial, ekonomi dan politik kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk menurunkan ketegangan atau situasi panas yang dialaminya dengan cara menggunakan metode persuasif; (3). Menghindar dari konflik yang berkepanjangan. Sikap ini adalah sifat arif yang harusnya dimiliki oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik terbuka dan berkepanjangan di antara mereka.

Boundling (Liliweri, 2005: 301-303) mengawali diskusinya tentang metode mengakhiri konflik, yakni:

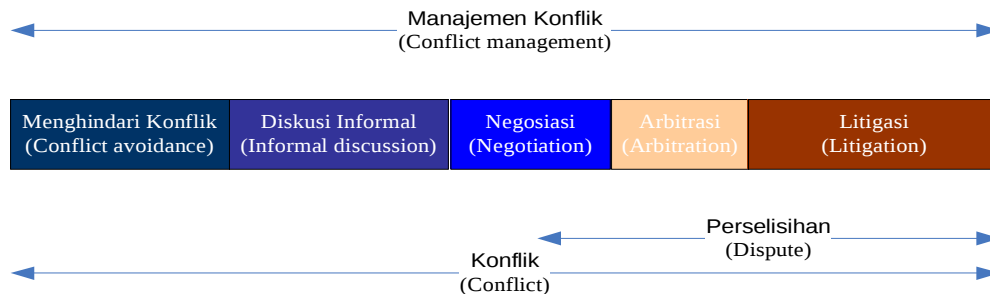
1. Menghindari konflik, yaitu menawarkan sebuah kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Tapi harus diperhatikan, langkah ini hanya bersifat sementara agar dua pihak saling mencari jalan terbaik untuk mengakhiri konflik. Langkah pertama manajemen konflik adalah mengakui bahwa situasi konflik itu memang benar ada, dan konflik tidak dapat ditolak sehingga harus diselesaikan.
2. Menaklukkan, atau mengeliminasi konflik adalah proses pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik yang terjadi dalam komunitas, dengan mengajukan program penyelesaian baru yang belum pasti diakui oleh satu pihak. Fasilitasi komunikasi dengan

memperbarui komunikasi, membuka diskusi bebas yang melibatkan semua anggota, melakukan komunikasi yang akurat dan memanfaatkan umpan balik dengan negosiasi.

3. Mengakhiri konflik sesuai prosedur, termasuk rekonsiliasi, kompromi dengan memberikan jaminan tertentu..Negosiasi adalah teknik yang digunakan dalam penyelesaian pelbagai sengketa, paling banyak digunakan untuk memecahkan masalah komunitas (Schilt, 1974). Beberapa prinsip yang digunakan dalam negosiasi sebenarnya berbasis pada teknik negosiasi dalam bidang bisnis, menurut Nierenberg (1968), dalam hubungan bisnis, yang diutamakan adalah kepuasan relasi antara dua pihak. Negosiasi memang sangat dibutuhkan untuk membangun kebersamaan dalam bisnis, karena negosiasi akan membentuk sikap kooperatif. (Liliweri, 2005: 301-303)

Para pemerhati konflik mengemukakan bahwa kompromi merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri konflik. Boundling menawarkan kompromi dengan penyelesaian sebagai berikut. Kompromi harus dipahami sebagai penyesuaian dan modifikasi yang mendekati teritori, nilai, tujuan, atau kebijakan yang melibatkan kedua belah pihak.

Rangkaian solusi penyelesaian perselisihan atau manajemen konflik yang terdiri atas beberapa tahapan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut yaitu :



Gambar 3. Rangkaian Penyelesaian Perselisihan
(Andi Asnudin, 2008;115)

Tahapan negosiasi merupakan tahapan awal yang dapat dilakukan melalui proses musyawarah dan bila tahapan ini gagal mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap kedua yang melibatkan mediator yaitu proses mediasi, dan tahapan arbitrase untuk mendapatkan win-win solution dilakukan

bila tahapan mediasi gagal, serta proses litigasi merupakan alternatif pilihan terakhir bila ketiga tahapan sebelumnya gagal.

Chang mengutip pendapat Boff mengatakan bahwa ada lima jenis etika yang sangat mendesak untuk diwujudkan dalam masyarakat dunia baru, yaitu : (1). Etika Empati, dimana setiap manusia perlu saling melihat dan memperhatikan sesama manusia dengan hati yang tulus ikhlas; (2). Etika Solidaritas yakni setiap manusia perlu memiliki sikap kepedulian sosial kepadasiapa saja yang sedang mengalami kesulitan; (3). Etika Tanggung jawab yaitu setiap manusia mengutamakan tanggung jawab terhadap pemikiran, ucapa, dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari; (4). Etika Dialog yaitu setiap individu atau kelompok manusia senantiasa perlu melakukan dialog untuk membicarakan secara terbuka, tulus, ikhlas dan serius tentang masalah kehidupan, kebenaran, kebaikan dan keselamatan umat manusia; (5). Etika Suci yaitu setiap individu atau kelompok memahami, memiliki dan mematuhi nilai-nilai universal yang berlaku dalam setiap waktu dan ruang serta kondisi. (Riadi,2008;26).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Resolusi Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat Kelurahan Lambara Dengan Kelurahan Baiya

Konflik tentu ada embrio yang menjadi pemicu atau cikal bakal nya. Ada faktor-faktor kebetulan yang menjadi momentum yang dipakai secara tepat untuk meledakkan konflik tersebut. Oleh karenanya penting untuk selalu memahami situasi-situasi yang ada di dalam masyarakat yang dapat menyebabkan konflik dan menjadi besar dan bersifat anarkhis atau penuh tindakan kekerasan.

Pemetaan konflik adalah langkah pertama untuk mengelola sebuah konflik tertentu. Tindakan ini akan membantu kedua belah pihak akan sebuah pemahaman yang lebih jelas tentang asal usul, sifat, dinamika dan kemungkinan penyelesaian konflik. Pemetaan konflik ini juga merupakan metode menghadirkan sebuah analisa terstruktur terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu pula. (Miall, 2002;142).

Berkaitan dengan hal di atas penting untuk mengetahui dan paham sebab mengapa konflik masih terjadi di antara kedua kelurahan. Hal ini akan membantu menjaga agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak akan menimbulkan konflik baru lagi karena adanya bahaya latent dalam masyarakat tersebut. Diharapkan bahwa upaya damai yang dilakukan kedua belah pihak akan menjadi bentuk resolusi konflik yang sifatnya permanen dan bukan hanya sebatas penyelesaian konflik sesaat.

Resolusi konflik yang telah dilakukan untuk meredam konflik yang terjadi di kedua kelurahan telah ditempuh, bila dipetakan sesuai dengan teori Boundling (Liliweri, 2005: 3013-303) maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. “Menghindari konflik” adalah menawarkan sebuah kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Dalam upaya penyelesaian konflik masyarakat Lambara dengan Baiya, pemerintah Kota Palu menawarkan pilihan damai kepada para tokoh masyarakat dan aparat desa. Tokoh masyarakat ini berperan sebagai koordinator lapangan dalam mewujudkan perdamaian di kedua kelurahan. Selain itu, ada penandatanganan kesepakatan (berita acara) perdamaian yang jika dilanggar akan menghasilkan konsekuensi tertentu. Lurah Lambara, Sarifudin menjelaskan sebagai berikut: *“Ketika ada yang bersalah, kedua belah pihak mendukung, tidak lagi membela, tidak lagi ramai-ramai ke kantor polisi” (Wawancara tanggal 14 Maret 2013)*. Jadi, jika ada yang melakukan tawuran, maka pihak kepolisian akan memproses kesalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak lagi menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan. Ketentuan ini berlaku bagi kedua belah pihak, baik Lambara maupun Baiya.
2. “Menaklukkan” atau mengeliminasi konflik dengan penegakkan hukum. Sesuai dengan perjanjian pemerintah dengan pihak dari Kelurahan Lambara dan Kelurahan Baiya, jika konflik kembali terjadi, maka penegakkan hukum akan digunakan sebagai pendekatan penyelesaian. Hal ini dinyatakan oleh Petugas Polsek Palu Utara, Iwan sebagai berikut: *“Bahkan, dalam perjanjian yang difasilitasi pemerintah, dua belah pihak sepakat kalau tawuran lagi maka diproses hukum.” (Wawancara tanggal 13 Maret 2013)*
3. “Mengakhiri konflik” melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi dalam kesepakatan jika terjadi konflik, Penyelesaian konflik antara kelurahan Lambara dan Baiya memerlukan solusi yang bersifat permanen yang hingga kini belum terealisasi sepenuhnya. Ada rencana pertemuan akbar yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik, namun hal ini masih sebatas wacana. Lurah Lambara, Arifudin Tahawila menyatakan sebagai berikut:

“Rencana kita ingin perdamaian akbar antara dua kelurahan ini sekaligus mengembalikan nama kecamatan Tawaeli. Rencana kita itu. Dari Walikota dan Kantimbas Polres Palu siap mengadakan pertemuan pada waktu itu, yang mungkin dalam waktu dekat ini kita akan kita adakan damai bersama begitu. Begitu barangkali.” (Wawancara tanggal 14 Maret 2013)

Lebih lanjut menurut Boundling(Liliweri, 2005: 301-303) harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Mengakui Dan Mengetahui Bahwa Ada Konflik

Pengakuan atas konflik yang terjadi antara kelurahan Lambara maupun Baiya tentu tidak dapat disangkal lagi, karena memang konflik antara kedua kelurahan di kalangan pemudanya sudah bersifat terbuka. Ketegangan sosial dalam kehidupan sehari-hari juga sangat terasa. Konflik yang terjadi antara kelurahan Baiya dan Lambara, menurut Juliansyah salah seorang warga Baiya:

“Kalau konflik yang terjadi antara Baiya dan Lambara, itu sering. Untuk peristiwanya, itu awal-awalnya itu dikarenakan karena masalah bola itu, karena saling ejek-ejek di lapangan, terjadilah konflik. Nah, terjadinya itu pertama kali. Kita bukan mau membela warga saya sendiri. Kalau kalian ke Lambara, pasti mereka juga akan bela kampungnya sendiri. Kita lihat bukti fisik, kejadian pertama tiga malam berturut-turut, itu warga dari Lambara. Saya tidak bisa bilang pastinya itu warga Lambara, tapi waktu kejadian tiga malam berturut-turut itu, mereka melakukan penyerangan di depan rumah saya sendiri sampai masuk ke wilayah warga Baiya 600 meter. Itu yang mereka masuki. Nah, tiga malam mereka menyerang, warga Baiya tidak berbuat apa-apa. Lalu, saking bosannya warga Baiya diserang, maka terjadilah pembalasan, sampai kantor desa Lambara rusak, cuma dilempar.” (Wawancara tanggal 14 Maret 2013)

Pengakuan yang sama juga diungkapkan oleh Lurah Lambara Safroodin, yang menegaskan: *“Sekarang ini, akhir-akhir ini ada tenggat waktunya, setiap malam minggu. 3 minggu terakhir ini ada konflik yang sering terjadi.”* (Wawancara tanggal 14 Maret 2013)

Menganalisis Situasi Yang Ada

Konflik dapat dilihat sebagai “perkelahian, peperangan atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan berbagai pihak yang terkait muncul beberapa faktor pendukung timbulnya konflik yang ada didalam masyarakat di kelurahan Lambara maupun Baiya sebagai berikut:

- a. Faktor pendidikan yang rata-rata rendah yang disertai dengan ketiadaan pekerjaan tetap. Hal ini diakui sendiri oleh salah seorang pemuda Baiya, Juliansyah: *“Kalau faktor pendidikan, tahulah kalau orang yang paling mudah diprovokasi pasti yang pendidikannya lemah, kan... Tapi coba kalau yang masih punya sekolah, pasti masih berpikir, untuk apa. Masih satu keluarga juga.”* (Wawancara tanggal 14 Maret 2013)

- b. Muncul kelompok-kelompok “minum bersama” di kalangan para pemuda. Para pemuda yang mengkonsumsi alkohol tersebut paling sering membuat keributan di tempat-tempat pesta. Keributan-keributan semacam itu kadang menimbulkan rasa dendam sehingga sangat mudah bertransformasi menjadi tawuran antar-kelompok. Hal ini dijelaskan oleh Lurah Lambara, Safrudin yakni sebagai berikut:

“Sebab umumnya karena Narkoba, kemudian minum minuman keras... Awalnya biasanya pertikaian antara dua orang, sehingga pulang, masing-masing ajak teman, jalan-jalan, lalu terjadi di warung, kadang-kadang di perempatan atau tempat lain. Padahal perkelahian yang hanya dua orang. Kadang-kadang hanya karena ada yang buang kata-kata kotor, itu lah rentan jadi konflik, tawuran.” (Wawancara tanggal 14 Maret 2013)

- c. Kecemburuan sosial yang berawal dari Beredarnya isu peruntukan Kawasan Ekonomi Khusus hanya untuk Kelurahan Baiya, karena wilayah kelurahan Baiya masuk dalam zona kawasan ekonomi. isyu ini kemudian membuat sebagian masyarakat di kelurahan Lambara menjadi cemburu karena masyarakat kelurahan Baiya akan mendapatkan untung besar dari hasil penjualan tanah, masyarakat Baiya akan mendapatkan proyek keamanan kawasan ekonomi khusus, dan lain-lain. Hal ini dijelaskan oleh tokoh pemuda Baiya, Juliansyah :

“Tapi kalau yang baru itu karena ada kecemburuan sosial dan politik untuk pengamanan kawasan ekonomi khusus. Itu kalau untuk sekarang. Kalau kemarin itu kan karena ada faktor balas dendam. Komunikasi untuk perdamaian sudah. Semua penyelesaian sudah dilakukan. Kalau dari warga Baiya, mereka itu mungkin keamanan, karena kenapa? Setiap melakukan penyerangan mereka tidak pernah melakukan penyerangan duluan. Mereka hanya menunggu di tempat... Kalau kalian tanyakan pada masyarakat Baiya, pasti jawabannya karena pengembangan kawasan ekonomi khusus.” (Wawancara tanggal 14 Maret 2013)

Pada prinsipnya, masyarakat Baiya-Lambara setuju jika kawasan ekonomi khusus diberlakukan, karena mereka beranggapan dengan adanya kawasan ekonomi khusus, maka penduduk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja pabrik.

- d. Penegakkan hukum yang lemah yang disertai dengan kesadaran hukum masyarakat yang lemah.. Dalam hal kasus tawuran, aparat polisi bertindak dengan menangkap pelaku tawuran, tetapi pelaku dibebaskan karena

tuntutan masyarakat setempat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Lurah Lambara, Safrudin bahwa:

“Mendukung penegakkan hukum, mendukung sepenuhnya penegakan hukum. Ketika ada yang bersalah, kedua belah pihak mendukung, tidak lagi membela, tidak lagi ramai-ramai ke kantor polisi. Logikanya begitu, Anda bisa olah sendiri, asal jangan menyudutkan salah satu pihak. Kan, biasanya begitu, kesepakatan bisa dilanggar, perintah Allah saja bisa dilanggar, apalagi hanya kesepakatan seperti ini. Logikanya selama ini begitu, bisa Anda sendiri yang mengembangkan.” (Wawancara tanggal 14 Maret 2013)

Tokoh masyarakat Lambara, Arifudin Tahawila juga menegaskan pentingnya penegakkan hukum sehingga ada efek jera, sebagaimana yang ia jelaskan dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Kemudian, penegakan hukum itu juga perlu supaya ada efek jera. Sudah ada orang Lambara ditangkap karena bawa busur, sudah ada juga orang Baiya ditangkap. Jadi ada efek jera. Ada anak Lambara bawa busur, mengaku-mengaku adeknya Brimob juga langsung dipukul sama polisi karena melawan. Ada penegakan hukum, ada efek jera.” (Wawancara tanggal 11 Maret 2013)

Fasilitasi Komunikasi

Fasilitasi komunikasi dengan memperbarui komunikasi, membuka diskusi bebas yang melibatkan semua anggota masyarakat, melakukan komunikasi yang akurat dan memanfaatkan umpan balik dengan negosiasi. Menurut Ketua Forum Bankamdes Baiya, Arpuali, proses fasilitasi komunikasi sudah dilakukan dan akan terus dilakukan, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

“Itu pengaruh di antara anak-anak muda. bukan karena ada penyelesaian antara Baiya dan Lambara yang sebelum-sebelumnya, itu jelas-jelas tidak ada. Ini sebenarnya antara anak-anak muda Lambara dengan anak-anak muda Baiya. Olehnya itu, saya selaku ketua forum Bankamdes kelurahan Baiya ini, kita sudah mengadakan kesepakatan baik di Polres maupun di Walikota, di kecamatan, sampai sekarang ini belum ada terselesaikan, artinya kalau orang tua bilang itu sudah berkali-kali kita orang tua ini mengadakan kesepakatan damai tapi anak-anak muda itu belum.” (Wawancara tanggal 14 Maret 2013)

Hal senada juga diakui oleh Lurah Lambara, Safrudin, yang menyatakan:

“Kalau itu sudah ada caranya. Ketika terjadi konflik pertama, kita difasilitasi oleh pihak Polsek, damai, buat perjanjian sampai dilanjutkan ke tingkat kota. Sampai di Kota, sampai yang tandatangan itu Dandim, Walikota, Kapolrestasta dan kedua belah pihak. Itu penandatanganan waktu di Walikota. Kemudian, setelah itu reda. Tapi, namanya ini anak-anak muda, kalau tidak minum, tidak mau, tapi kalau minum, kan, pasti mau. Selain itu, kan, ada hiburan malam, diselingi dengan acara pesta. Ada maksud juga dero, seperti itu. Awalnya dari situ. Minumnya di rumah, maboknya di sini. Biasanya minumnya di tempat lain, maboknya di sini.”

Dalam upaya penyelesaian konflik antara pemuda Lambara dengan pemuda Baiya, pemerintah Kota Palu menawarkan pilihan damai kepada para tokoh masyarakat dan aparat desa dengan Penandatanganan Kesepakatan (berita acara) Perdamaian pada Jumat, tanggal 1 Maret 2011, Walikota Palu, Rusdy Mastura, memfasilitasi pertemuan antara Lurah Lambara, Lurah Baiya dan tokoh masyarakat dari kelurahan itu di Kantor Walikota Palu. Pertemuan tersebut guna membicarakan upaya damai pasca bentrokan susulan antarwarga di dua kelurahan itu, Jumat dini hari (11/3).

Lurah Lambara, Sarifudin, mengatakan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang penting untuk dilibatkan, sebagaimana yang pernyataannya sebagai berikut: *“Yang jelas, yang perlu hadir itu, kan, bukan mereka (pemuda yang terlibat tawuran—peneliti), tapi tokoh-tokohnya.”* (Wawancara tanggal 14 Maret 2013)

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Resolusi penyelesaian konflik telah banyak dilakukan, baik pihak masyarakat sendiri ataupun pemerintah daerah. Penandatanganan kesepakatan damai telah dibuat oleh tokoh-tokoh yang mewakili masing-masing kelurahan. Tindakan hukum juga akan diambil manakala ada pihak-pihak yang melanggar aturan ini, sehingga penyelesaian secara kekeluargaan tidak akan lagi dipergunakan.

Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah terurai sebelumnya serta terangkum dalam kesimpulan maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan peran serta pemuda masing-masing kelurahan dalam setiap upaya damai yang dilakukan.
2. Meningkatkan pemberdayaan kelompok-kelompok yang ada di kelurahan masing-masing ke arah yang positif, sehingga pemuda punya aktivitas yang positif pula serta memaksimalkan fungsi opinion leader para pemuda agar mampu mengarahkan energi mereka ke arah yang positif.
3. Masyarakat desa, aparat desa serta pihak-pihak terkait, khususnya kepolisian, sebaiknya sering membuka forum-forum diskusi warga, sehingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat bisa semakin baik. Hal ini juga membantu untuk melihat adanya potensi-potensi konflik latent yang ada, sehingga lebih cepat terselesaikan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bulaeng, Andi, 2000. *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Hasanuddin University Press Makassar.
- , 2002. *Teori dan Manajemen Riset Komunikasi*. Narendra. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Ecip, S. Sinansari. 2002. *Rusuh Poso. Rujuk malino*. Cahaya Timur. Jakarta
- Faisal, Sanapiah. 2008. *Format-format Penelitian Sosial. Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian*. Pustaka Eureka. Surabaya.
- Gudykunst, William B. Kim, Young Yun. 1997. *Communicating With Strangers*. Third Editions. Me Graw Hill.
- Kincaid, Lawrence& Wilbur Schramm, 1987. *Asas-asas Komunikasi Antar Manusia*. LP3ES dan East - West Communications Institute Hawai - Jakarta.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta. Lkis.

- , 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Miall Hugh, Ramsbotham Oliver and Woodhouse Tom, 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaian, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Konflik*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat, ed. 1996. *Komunikasi Antar Budaya*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nasikun. Dr. 2003. *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta. Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Paloma, Margareth M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Purwasito, Andrik. 2003. *Komunikasi Multicultural*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Rladi, Slamet Dkk. 2008. *Pemekaran Wiiayah dan Potensi Konflik*. Laporan Akhir Penelitian Fundamental. Untad. Palu
- Rakhmat, Jalaluddin. 2000. *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ruben, Brent D. Lea P Stewart. 1998. *Communication and Human Behaviour*. Allyn and Bacon.
- Samovar, Larry A Porter Richard E & Jain Nemi C. 1985. *Interculture Communication*. A Reader Fifth Editions, Bermoth Wadsworth Publishing Company.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Prenada Media Group. Jakarta.

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT NELAYAN PULAU BATANG LAMPE DI SULAWESI SELATAN

Haslinda B.Baji

Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

ABSTRAK

Permasalahan berkenaan nelayan dan komunitas pesisir tidak akan selesai untuk dibahas bahkan dalam berbagai perspektif sekalipun. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diteliti dan diklasifikasikan. Adapun pengklasifikasian dilakukan melalui kegiatan yang difokuskan pada pengumpulan data tentang model pemberdayaan ekonomi yang berwawasan lingkungan pada masyarakat nelayan di pulau Batang Lampe, Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa wilayah Pulau Sembilan khususnya pulau Batang Lampe sebelumnya merupakan pulau yang sangat kaya akan sumberdaya lautnya (hayati dan non-hayati), namun dengan penangkapan yang berlebihan (over fishing/over exploitatio) dan penggunaan bahan peledak bahan kimia (potacium cyanide) menjadikan menjadikannya rusak dan habis jumlahnya. Hal tersebut berdampak pada penduduk nelayan pulau Balang Lampe yang selalu ada dalam garis kemiskinan. Oleh karena itu dengan skema ponggawa-sawi yang berfokus pada pengelolaan lingkungan kiranya kehidupan ekonomi nelayan bisa menjadi baik.

Key words: Nelayan, Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat,

PENDAHULUAN

Umumnya setiap kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat memiliki cara pandang tersendiri dalam menanggapi lingkungan hidupnya (Parsons, 1968). Misalnya, pada nelayan di Sulawesi Selatan (Hamid, 1987) memiliki cara pandang bahwa laut dan isinya merupakan milik bersama yang dapat dimanfaatkan bersama-sama secara maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, setiap wilayah yang mereka dengar atau ketahui memiliki berbagai jenis biota laut bernilai ekonomi tinggi, maka wilayah tersebut akan terjadi persaingan penangkapan yang sangat tinggi yang ada kalanya dilakukan dengan cara-cara penangkapan yang merusak ekologi laut.

Pada dasarnya ekosistem-ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lumut secara alamiah sangat berperan dalam kelangsungan hidup sumberdaya hayati seperti ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, teripang, dan kerang-kerang yang dapat menunjang kehidupan manusia, terutama bagi masyarakat desa pantai yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber kelautan (Effendi, 1993). Namun demikian, ekosistem tersebut telah banyak berada dalam kondisi mengkhawatirkan karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sebagian besar dari kelompok-kelompok nelayan nampaknya kurang mengetahui arti penting ekosistem laut. Terumbu karang dan hutan mangrove memiliki fungsi ekologis yang menjadi penyangga bagi kelangsungan hidup biota laut dan plasma nutfah yang memiliki fungsi ekonomi tinggi. Hal ini kemudian menjadikan ketidakseimbangan ekosistem yang kemudian berdampak pada kerusakan sumberdaya laut (Lampe, 1996).

Pemanfaatan sumberdaya laut dengan intensitas tinggi oleh kelompok-kelompok nelayan, nampaknya kurang mendapat pengawasan yang intensif dari petugas keamanan laut dan lembaga-lembaga terkait. Karena beberapa lokasi seperti wilayah pantai barat (Selat Makassar) maupun wilayah pantai timur (Teluk Bone) berada pada kondisi yang memprihatinkan. Ini disebabkan oleh faktor intensitas persaingan dalam penangkapan yang tinggi. Karena berorientasi pada nilai ekonomi hasil laut yang semakin tinggi, sementara tingkat pendapatan para anggota sawi (buruh) atau katakanlah kelompok-kelompok nelayan masih sangat rendah.

Pada umumnya nelayan yang berstatus sawi memperoleh pendapatan yang sangat rendah dan tidak merata. Hal ini ditandai dengan adanya sistem bagi hasil yang berlangsung dikalangan kelompok nelayan, di mana bagian

yang diperoleh sawi dalam setiap kelompok nelayan hanya berkisar 15% dari pendapatan bersih harus dibagi 5 sampai 6 orang anggota kelompok.

Sedangkan ponggawa darat sebagai “pemilik modal kerja” memperoleh pendapatan bersih sekitar 85%, setelah keluar biaya oprasional (ongkos selama melaut) yang digunakan oleh anggota kelompoknya. Karena itu, sudah saatnya harus dilakukan “*re-strukturasi dan re-organisasi kenelayanan*” dan dilengkapi “*modifikasi model bagi hasil yang secara merata, guna meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin*”.

Rendahnya diversifikasi usaha/pekerjaan pada setiap keluarga nelayan, khususnya bagi istri-istri, janda, dan anak-anak remaja nelayan⁴¹, sehingga sumber-sumber pendapatan yang juga sangat rendah pada setiap keluarga. Dalam kondisi kehidupan yang sedemikian rendahnya, maka perlu menciptakan usaha-usaha alternatif yang produktif guna menambah pendapatan dikalangan keluarga nelayan.

Masalah lainnya adalah pada proses pemasaran hasil-hasil produksi yang pada umumnya belum dimiliki oleh kelompok-kelompok nelayan. Sehingga pola pemasaran masih dikuasai/dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu dengan harga penjualan yang relatif sangat rendah. Bahkan sebagian besar kelompok-kelompok nelayan tidak memiliki alat-alat produksi, skala besar, seperti perahu, mesin dan alat tangkap (jaring). Alat-alat produksi dan biaya oprasional umumnya disiapkan oleh “*punggawa darat*” dengan ketentuan seluruh hasil produksi diserahkan kepada “*punggawa darat*” untuk dijual dengan harga ditekan dibawah harga standar karena mereka adalah pemilik alat-alat produksi.

Sarana lain yang menjadi masalah adalah sarana pengawetan ikan (*es batu*). Beberapa tempat seperti pulau, memiliki hasil tangkapan yang cukup tinggi dan variatif. Namun dengan kurangnya *es batu* sebagai bahan pengawetan ikan, menjadikan hasil laut harus dijual cepat dengan harga yang relatif rendah. Begitu juga dengan keterlibatan kaum wanita nelayan pada kegiatan alternatif produksi untuk keluarga masih sangat rendah.

Di beberapa pulau, air tawar juga menjadi masalah serius. Karena ada pulau yang tidak memiliki air tawar sehingga menjadikan keluarga-keluarga nelayan harus membeli air di Ibukota Kecamatan dengan harga Rp. 100 – Rp.

⁴¹ Kemiskinan yang dialami nelayan sawi merupakan bentuk dari kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Kusnadi (2009: 24) memaparkan bahwa nelayan didera oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal

200 per liter, padahal ada juga beberapa pulau yang memiliki potensi air tawar yang dapat diusahakan dengan cara membor dengan kedalaman tertentu.

Pada umumnya anak-anak nelayan hanya tamat Sekolah Dasar (SD) karena sarana dan prasarana pendidikan yang ada relatif sangat terbatas. Begitu juga fasilitas kesehatan, khususnya tempat pembuangan tinja (WC) dan tempat pembuangan sampah nampaknya masih banyak penduduk pulau yang membuang dipinggir pantai.

PERMASALAHAN

Dari gambaran di atas maka persoalan/masalah berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana kondisi sosial demografi, ekonomi, budaya, potensi dan kondisi sumberdaya alam (laut) menurut pandangan masyarakat nelayan sebagai penggunaanya ? bagaimana pandangan, kebutuhan, keinginan, penilaian, keluhan, dan kemauan ikut berperan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakatnya?, (2) Bagaimana model program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang berwawasan lingkungan?, (3) Kegiatan-kegiatan utama apa saja yang tercakup dalam program pemberdayaan yang direkomendasikan?

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenali dan memberikan masukan berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi yang berwawasan lingkungan pada masyarakat nelayan pulau batang lampe, mencakup beberapa kondisi sebagai berikut :

1. Menunjuk kondisi-kondisi sosial demografi, ekonomi, budaya, dan sumberdaya laut (hayati dan non-hayati) dari masyarakat nelayan pendukung kebudayaan perikanan dan pengguna sumber daya laut.
2. Identifikasi kondisi-kondisi subjektif masyarakat nelayan (kelompok, individu) berupa: pandangan, penilaian, keinginan, (kebutuhan, keluhan, kemauan, ikut berperan dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakatnya).
3. Menyusun suatu model pemberdayaan ekonomi serta strategi-strategi yang mencakup dalam program pemberdayaan tersebut.

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pada dasarnya konsep pemberdayaan ekonomi di Indonesia masih sangat kurang ditampilkan pada literatur-literatur. Dalam implementasi program-program yang dilakukan diharapkan pelaksana program tidak memandang dari segi umur, agama, suku, status pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Sesungguhnya hal itu dilakukan hanya semata-mata agar dapat memberikan manfaat sosial ekonomi, sosial budaya, sosial demografi, dan sosial politik yang berkelanjutan terhadap setiap individu atau kelompok-kelompok sosial yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Sehingga melalui pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, maka masyarakat miskin (Alfian, 1980) dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara mendasar, dan mampu mengatasi masalah-masalah yang dapat mengganggu stabilitas sumber-sumber kehidupannya.

Dengan demikian, dapat dirumuskan secara sederhana bahwa pengertian pemberdayaan ekonomi adalah suatu upaya untuk menciptakan peningkatan dan pemerataan pendapatan bagi rakyat miskin. Prioritas utama dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) bagi kelompok-kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ini berarti bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak memerlukan tambahan tersebut, sehingga distribusi bantuan yang diberikan lebih dinikmati secara radikal atau kepada individu-individu yang “*miskin secara structural*”.

B. Pengertian Pelestarian Lingkungan

Lingkungan manusia sering disebut sebagai lingkungan hidup. Istilah lingkungan (Arifin, 1991) selalu mengandung dua arti, yakni selalu dikaitkan dengan unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan yang hidup, dan kompleksitas dari unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain secara timbal balik, sehingga terjadi suatu jaringan hubungan atau relasi antar unsur-unsur – baik yang mati maupun hidup – yang terdapat dalam lingkungan manusia.

Lingkungan manusia sering disebut sebagai lingkungan hidup. Istilah lingkungan (Arifin, 1991) selalu mengandung dua arti, yakni selalu dikaitkan dengan unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan yang hidup, dan kompleksitas dari unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain secara timbal balik, sehingga terjadi suatu jaringan hubungan atau relasi antar unsur-unsur – baik yang mati maupun hidup – yang terdapat dalam lingkungan manusia.

Lingkungan hidup manusia sangat banyak keanekaragamannya dan tiap ragam lingkungan memiliki ciri-cirinya sendiri. Karena itu, lingkungan laut

atau ekosistem laut (*marine ecosystem*) sebagai bagian dari ragam lingkungan mempunyai ciri-ciri atau ragam tertentu yang membedakannya dengan lingkungan lainnya. Lingkungan laut khususnya sumberdaya ikan termasuk dalam sumberdaya yang bersifat terbarui. Meskipun demikian, kelestarian sumberdaya perikanan banyak terganggu oleh meningkatnya pertumbuhan tanaman air yang menutupi permukaan perairan, serta pencemaran akibat pembuangan limbah industri dan kota, penggunaan pestisida dalam rangka intensifikasi usaha pertanian, serta penggunaan bahan racun/bius dan bom ikan oleh kelompok-kelompok nelayan yang tidak bertanggung jawab.

Selain menjadi sumber cadangan mineral, energi, dan makanan, laut merupakan tempat kehidupan dari berbagai jenis burung-burung yang sangat berguna bagi pertanian (pembentukan pupuk guano oleh burung-burung laut), daerah-daerah rekreasi (pantai laut merupakan daerah peristirahatan, sport dan sebagainya). Selain itu penyebab kerusakan lingkungan laut adalah air sungai yang membawa kotoran dari daratan, buangan sampah dari kapal-kapal laut, buangan sampah dari tempat galian-galian bahan mentah, kecelakaan di tengah laut, penggunaan bahan peledak atau racun (*potassium cyanida*) oleh kelompok-kelompok nelayan tertentu.

Kerusakan lingkungan yang terjadi perlu dilakukan pencegahan terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, pencegahan pengambilan karang laut, pembatasan jumlah penangkapan ikan dan hasil laut lainnya, pengembangan peraturan usaha perikanan pantai agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seimbang dengan daya dukung lingkungan pesisir (Salman, 2006: 65). Kerusakan hutan bakau (*mangrove*) pada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang dialih fungsikan sebagai tambak dan kayu bakar, padahal ekosistem itu sangat penting karena merupakan sumber benih ikan dan udang. Karena itu, sudah saatnya perlu direhabilitasi melalui penghijauan (reboisasi) dalam rangka menunjang kelestarian ekosistem laut secara keseluruhan (Arifin, 1999).

Arieta (2010: 73) dalam penelitiannya menuliskan bahwa kelestarian lingkungan pesisir tercipta karena adanya pemberdayaan masyarakat pesisir yang memunculkan kekuatan komunitas akibat dari sistem *bottom up*. Aspek pemberdayaan mendorong terciptanya kesadaran penuh dari masyarakat untuk mengelola kawasan wisata yang berdampak terjaminnya keramahtamahan, kelestarian budaya dan lingkungan. Kebijakan yang bersifat *bottom up* juga harus mendapat dukungan secara simultan dari pemerintah agar kelestarian lingkungan bisa terus terjaga (Astono, 2010: 1—5).

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini difokuskan pada pengumpulan data objektif tentang model pemberdayaan ekonomi yang berwawasan lingkungan pada masyarakat nelayan di pulau Batang Lampe, Sulawesi Selatan. Merupakan salah satu pulau dari delapan pulau berpenghuni di kabupaten Sinjai. Tepatnya berada di ujung utara gugusan Pulau-Pulau Sembilan (Burungloe, Leang-Leang, Kambuno, Kodingare, Katindoang, Kanalo I, Kanalo II, Batang Lampe dan satu pulau tak berpenghuni Larea-rea). Responden atau informan (sumber data), yaitu pemerintah, tokoh agama, pemuka masyarakat, pemangku adat, nelayan, pedagang dan sumber-sumber informasi lain.

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan kuesioner semi struktur. Sedangkan data sekunder baik berupa deskripsi masalah atau data statistik diperoleh dari berbagai dinas/instansi terkait penelitian. Sifat data, historis (sejarah), frekuensi, dan cover behavior.

Menggunakan metode kualitatif (Koentjaraningrat, 1977; Maleong, 1989) dengan melakukan wawancara mendalam (*indept-interview*) dengan informan. Informan disini adalah : ponggawa, papalele, ponggawa laut juragang, nelayan (sawi senior), staf desa, Kepala Lingkungan/Kepala Dusun, Kecamatan, Dinas Perikanan, Bappeda, dan lain-lain. Dalam wawancara digunakan pendekatan/metode ertografi baru (*new ethnography*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek yang tidak dapat diabaikan dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan masyarakat adalah faktor intern sendiri. Yaitu terletak pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara nyata dan berkelanjutan (*sustainable*). Jadi salah satu yang terpenting adalah keadaan sumberdaya manusia dan keadaan lainnya. Yang terbagi sebagai berikut:

1. Kependudukan

Batang Lampe adalah datu dari 9 buah pulau yang termasuk kelompok Pulau-Pulau Sembilan yang terletak di Teluk Bone Sulawesi Selatan. Batang lampe yang merupakan pulau terbesar kedua (dari 9 buah pulau) sesudah Pulau Burungloe, terletak disebelah paling utara deretan Pulau-Pulau Sembilan.

Batang Lampe merupakan salah satu dusun dari 7 dusun di pulau lain sekitarnya. Jumlah penduduk Dusun Batang Lampe sebanyak 39 KK, dengan jumlah penduduk sebesar 443 jiwa, yang terdiri dari 209 jiwa laki-laki dan 234 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin adalah 89,3 atau terdapat 89 laki-laki setiap 100 orang perempuan. Asal-usul penduduk menurut informasi ialah suku bangsa Bugis Sinjai, Bugis Bone, dan Bajo. Antara Bugis dan Bajo di

Pulau Batang Lampe telah terjadi proses perkawinan dan pembauran kebudayaan⁴².

2. Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk pada umumnya adalah pada sektor perikanan laut. Dari jumlah 296 usia produktif (15-64 tahun) hanya 111 orang. Dengan pembagian sebanyak 80,2% adalah nelayan, pedagang sebanyak 10,8%, PNS/ABRI sebanyak 5,4%, petani non-nelayan 1,8%, dan beberapa jenis pekerjaan lainnya 1,8% saja.

Saat ini khususnya di Pulau Batang Lampe menurut beberapa informan, sebagian besar nelayan sudah beralih ke alat tangkap berupa pancing dan bubu. Diperkirakan sekitar 75% - 95% nelayan menggunakan alat tersebut. Menyusul kemudian kompresor yang digunakan oleh para nelayan tripang. Hasil tangkapan dijual di punggawa darat/bos untuk kemudian didistribusikan ke wilayah Makassar dan sekitarnya.

Beberapa pedagang di pulau mengambil stok barang langsung dari Balanipa, ibu kota kabupaten Sinjai. Sementara seluruh penduduk sejak dahulu selalu mendatangkan air tawar untuk diminum dan kebutuhan lainnya.

3. Pendidikan

Pendidikan penduduk Batang Lampe sebagian besar tamat SD yaitu 38,9%, sebagian lainnya adalah tamatan SLTP, SLTA dan dua orang yang tamat di Perguruan Tinggi di Kota Makassar dengan jumlah 7,5% saja. Jumlah yang tidak pernah sekolah dan lulus SD juga masih cukup tinggi yaitu masing-masing 25,3% dan 35,9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk pulau Batang Lampe masih relatif rendah dilihat dari tingkat pendidikan formal yang ditamatkan.

Di luar jalur pendidikan formal, penduduk setempat juga pernah mendapat pelatihan keterampilan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari mereka. Jenis pelatihan mereka hadapi berupa: (1) pelatihan budidaya rumput laut, (2) pelatihan budidaya tripang. Bentuk pendidikan non-formal lainnya adalah berupa pendidikan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun.

4. Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga

Pada Pulau Batang Lampe terdapat hampir 46,3% responden memiliki tingkat pendapatan rumah tangga yang tergolong rendah, yaitu dibawah Rp. 150.000,- sebulan. Dengan rata-rata ART sebanyak 4-5 orang, jumlah ini jelas

⁴² Lihat juga Koentjaraningrat (1983) yang menulis mengenai perkawinan dan persebaran penduduk di wilayah nusantara.

sangat sedikit untuk ukuran hidup di pulau kecil dimana bagian besar kebutuhan konsumsi tidak bisa diadakan secara subsisten. Rendahnya pendapatan juga diperlihatkan terdapat 13,0% responden yang pendapatan rumah tangganya dibawah Rp. 75.000,- sebulan.

Apabila dirata-ratakan, maka diperoleh rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 169.426,- dan rata-rata pendapatan kepala keluarga sebesar Rp. 155.591,- perbulan. Sementara rata-rata pendapatan istri perbulan Rp. 3.486,- dan pendapatan anggota rumah tangga lain hanya mencapai Rp. 10.349,-. Gambaran ini melengkapi kemiskinan di pulau ini, yaitu bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan rendahnya pendapatan tetapi juga oleh rendahnya jumlah penduduk yang bekerja. Hal terakhir adalah berkaitan dengan kesulitan yang mereka hadapi berkaitan dengan pengembangan usaha dan pencarian alternatif usaha baru (Kusnadi, 2003).

Dari pendapatan tersebut masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan primer yang sangat mendasar yaitu membeli bahan makanan. Dengan jumlah pengeluaran Rp. 108.387,- untuk makanan, Rp. 37.989,- untuk non-makanan per bulan setiap rumah tangga.

5. Akses Sarana dan Prasarana

Berbicara mengenai sarana dan prasarana, masyarakat di Pulau Batang Lampe cukup sulit dalam mengaksesnya. Ini dikarenakan letak pulau yang cukup jauh dengan akses-akses terkait serta keadaan dan kondisi ekonomi yang terbatas.

Beberapa akses sarana dan prasarana yang cukup terjangkau meskipun beberapa berada diluar pulau Batang Lampe yaitu: (1) akses terhadap pasar, (2) akses terhadap lembaga keuangan, (3) akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan, (4) akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan informasi.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Masalah terkait mengeai keadaan sosial ekonomi adalah : (1) permodalan dan investasi, (2) produksi ikan dan non-ikan, (3) pengelolaan hasil produksi, (4) pemasaran hasil produksi, (4) pengembangan alternatif usaha (budidaya tripang dan ikan karang, usaha keramba).

Sementara keadaan sosial budaya meliputi beberapa hal yaitu : (1) sumber-sumber kelautan dan sistem pengetahuan tradisional, (2) sistem pengelolaan ekosistem laut dan terumbu karang (meliputi organisasi pengelolaan, wilayah pengelolaan, legalitas dan konflik, pelanggaran dan sangsi, aturan formal), (3) aktifitas eksploitasi sumberdaya laut (terkait

mengenai teknologi tangkap seperti pancing, bubu, pukat/net), (4) aspirasi masyarakat, dan (5) peran wanita⁴³.

5. Aspek Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Yang Berwawasan Lingkungan

Dalam era saat sekarang ini pemberdayaan nelayan (Nawawi, 2009) untuk meningkatkan taraf hidupnya haruslah didasarkan pada sistem ekonomi berbasis kerakyatan, ialah ekonomi partisipatif yang memberikan akses yang wajar dan adil bagi seluruh masyarakat (seluruh stakeholders hasil-hasil laut) dalam memanfaatkan sumberdaya alam serta dalam melakukan kegiatan produksi dan distribusi. Konsep pemberdayaan nelayan dimaksudkan sebagai sesuatu upaya yang dilakukan oleh unsur luar terhadap masyarakat nelayan, agar masyarakat tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan terdapat dua komponen yang perlu dipahami/dikaji secara mendalam yaitu komponen luar (pemberdayaan) dan komponen masyarakat nelayan yang diberdayakan. Dari perspektif pembangunan berbasis masyarakat (Community Based Development - CBD), atau pengelolaan berbasis masyarakat (Community Based Management - CBM), masyarakat harus dipahami sebagai subjek pembangunan dan sekaligus sebagai objek pembangunan. Sedangkan komponen luar, apakah pemerintah, praktisi pembangunan, akademisi, pemberi dana dan sebagainya, lebih merupakan fasilitator saja.

Sebagai subjek dan objek pembangunan, maka sebelum pembangunan atau pengelolaan pemberdayaan dimulai mutlak dikaji dan dipahami terlebih dahulu kedua kondisi subjektif dan objektif dengan mana program pemberdayaan akan disesuaikan atau didasarkan. Kondisi subjektif mengandung segala kesadaran, penilaian, kemauan, aspirasi masyarakat itu, sedangkan kondisi objektif terdiri dari potensi SDM, sosial demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, termasuk potensi sumberdaya alam/lingkungan. Pendekatan CBD dan CBM dengan memberdayakan masyarakat nelayan atau pendekatan bottom-up adalah suatu model pembangunan yang secara mutlak mendasarkan kebijakan-kebijakan/program-programnya pada kondisi subjektif maupun objektif lokal masyarakat.

⁴³ Fajar (2011: 119—120) menuliskan bahwa ibu rumah tangga memiliki potensi sangat besar dalam memberdayakan keluarga. Ibu rumah tangga melalui pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan keteladanan keluarga, peningkatan kualitas diri khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh

Sehingga ada kategori program umum atau yang berlaku umum dan ada kategori program khusus yang hanya dilakukan ditempat-tempat tertentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Program umum seperti :

1. Pengembangan SDM (meliputi pengetahuan dan keterampilan formal dan non-formal),
2. Pengembangan Teknologi Perikanan yang ramah lingkungan,
3. Pengembangan teknologi pasca panen,
4. Pembangunan sarana/prasarana,
5. Penyadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan laut.

Sementara ada jenis program lain yaitu program khusus yang ruang lingkupnya lebih sempit dan program yang dijalankan sesuai dengan keadaan dan pertimbangan terkait (tertentu). Program khusus ini dapat meliputi :

1. Pengembangan teknologi perikanan laut semi-budidaya,
2. Pengembangan teknologi perikanan budidaya,
3. Pengelolaan wilayah perikanan dengan medel zonasi,
4. Pengembangan wisata alam dan budaya bahari.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Wilayah Pulau Sembilan khususnya pulau Batang Lampe sebelumnya merupakan pulau yang sangat kaya akan sumberdaya lautnya (hayati dan non-hayati). Tetapi dengan penangkapan yang berlebihan (*over fishing/over exploitatio*) dan penggunaan bahan peledak bahan kimia (*potacium cyanide*) menjadikan menjadikannya rusak dan habis jumlahnya.
2. Penduduk nelayan pulau Balang Lampe masih tergolong miskin. Ini ditunjukkan dengan mengacu pada indikator rendahnya tingkat pendidikan (formal dan keterampilan), rendahnya pendapatan, kepemilikan dan penguasaan alat-alat produksi (oleh para ponggawa saja), status nelayan yang umumnya adalah para sawi.
3. Nelayan Batang Lampe, seperti nelayan pulau-pulau lainnya, mempunyai daftar pengetahuan mendetail tentang laut (tradisional). Mereka juga diikat oleh kelompok-kelompok kerja *pongawa-sawi*.
4. Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut secara produktif dan berkesinambungan, nelayan Batang Lampe mempunyai aspirasi-aspirasi sebagai berikut :

- Diciptakan institusi pemilikan komunal atas lokasi-lokasi penangkapan dalam perairan Pulau Sembilan yang dapat mengantisipasi masuknya nelayan dari luar.
- Diciptakan mekanisme pasar yang menguntungkan baik bagi nelayan maupun ponggawa atau pedagang.
- Pengembangan teknologi semi budidaya, budidaya dan penegakan hukum berkaitan dengan penggunaan sarana tangkap yang merusak sumberdaya dan ekosistem laut.

b. Saran-Saran

Memperhatikan hasil yang telah dicapai, serta dengan mempertimbangkan potensi dan kendala yang dihadapi di pulau Batang Lampe, beberapa saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan maka dilakukan upaya pembentukan beberapa wilayah konservasi dan pengaturan proses penangkapan berdasarkan ketentuan.
2. Melakukan peningkatan taraf pendidikan (baik formal) maupun keterampilan (non-formal) melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.
3. Dalam rangka mengoptimalkan hasil produksi maka perlu dilakukan perbaikan dan penambahan sarana produksi dan penunjang produksi. Serta mengatur dengan baik pola distribusi hasil tangkapan.
4. Pemerintah daerah harus tetap mengontrol dan mengenali potensi-potensi pengembangan masyarakat terutama dibidang ekonomi yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Abu. 1987. *Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Sektor Kemaritiman di Sulawesi Selatan* (Suatu Tinjauan Sosio-Antropologi Ekonomi). Bappeda Sulawesi Selatan: UNHAS.
- Alfian, dkk. 1980. *Kemiskinan Struktural*. Malang: YIIS.
- Arieta, Siti. 2010. "Community Based Tourism pada Masyarakat Pesisir: Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi" dalam *Jurnal Dinamika Maritim Vool 2 No 1 September*. Halaman 71—79. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Arifin, Ansar. 1991. *Proses Pelembagaan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Dalam Masyarakat Nelayan (Thesis)*. Makassar: Universitas Hasanuddin,.

- Arifin, Ansar, dkk. 1999. *Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan Pada Masyarakat Nelayan Di Sulawesi Selatan*. Makassar: Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
- Astono, Widy. "Problem Sanitasi, Karakteristik Sosial Ekonomi dan Upaya Pemberdayaan masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Pekalongan" *dalam Jurnal Ekosains Vol. II No. 2. Juli. Halaman 1—5*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Effendi, Tajuddin Noer. 1993. *Sumberdaya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Fajar, M. Yusuf, Esti R. Sadiyah, Yurika Permanasari, Panji Patrimo dan Anisa Ayu Rosadi. 2011. "Peranan Ibu Rumah Tangga dalam pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Pusdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga)" *dalam Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora Volume 2, No 1. Halaman 1130—120*. Bandung: Universitas Islam Bandung
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Jember: Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Universitas Jember.
- Lampe, Muns. 1996. *Studi Analisa Sosial Untuk Program Perencanaan dan Pengelolaan Terumbu Karang Propinsi Sulawesi Selatan*. (Coremap). Makassar: LIPI-UNHAS.
- Maleong, Lexy J. 1989. *Metode Pelenilitian Kwalitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Parsons, Talcott. 1968. *An Outline Of The Social System*. Dalam Talcott Parsons, *The Theory Of Society*. New York: The Free Press.
- Salman, Darmawan. 2006. *Jagat Maritim: Dialektika Moderenitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa.
- Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. 2010. *Mixed Mthodes: In Social and Behavioral research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

